

Pelaksanaan Program e-Warong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Ranji

Zahra Aprilla Anadayoma¹, Muhammad Sahrul^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta; zhraprilla21@gmail.com, muhammad.sahrul@umj.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas Program e-Warong yang ialah satu di antara program dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada beragam kegiatan sosial, salah satunya adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi bawah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui operasional program e-Warong, proses pelaksanaan program serta manfaat yang diterima masyarakat usai menerima bantuan lewat program e-Warong. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta studi dokumenter. Teknik pengambilan sampel penelitian ini ialah data purposif, menyajikan informasi serta akhirnya menarik kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan terkait aktivitas program e-Warong yang dilaksanakan Pondok Ranji untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain penyaluran Bantuan Pangan Non-moneter untuk Penghidupan (BPNT), pelatihan kewirausahaan, dukungan untuk penguatan keluarga keluarga, semua kegiatan ini berjalan efektif, namun penguatan kepemimpinan dalam keluarga saja tidak akan berhasil secara efektif. Proses pelaksanaan program ini dibedakan pada 7 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap seleksi calon KPM e-Warong, tahap penyaluran bantuan sosial (BPNT), tahap pelatihan usaha, tahap penguatan keluarga, tahap evaluasi, serta tahap kelulusan. Banyak KPM e-Warong Pondok Ranji yang merasa berdaya serta berdaya dengan adanya program e-Warong terkait serta banyak KPM e-Warong Pondok Ranji yang sekarang hidup Sejahtera.

Katakunci: Pelaksanaan Program, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Keluarga

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.217>

*Correspondence: Muhammad Sahrul

Email: muhammad.sahrul@umj.ac.id

Received: 03-02-2024

Accepted: 15-03-2024

Published: 27-04-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research discusses the e-Warong Program which is one of the programs of the Family Hope Program (PKH) which focuses on various social activities, one of which is activities aimed at improving the economy of poor communities. The aim of this research is to determine the operations of the e-Warong program, the program implementation process and the benefits felt by the community after receiving assistance through the e-Warong program. This type of research is qualitative descriptive research. Data collection techniques include observation, interviews and documentary studies. The sampling technique for this research is purposive data, presenting information and finally drawing conclusions. The research results show that the e-Warong program activities implemented by Pondok Ranji to improve family welfare include the distribution of Non-monetary Food Assistance for Livelihoods (BPNT), entrepreneurship training, support for strengthening families, all of these activities are effective, but strengthening leadership in family alone will not work effectively. The process of implementing this program is divided into 7 stages, namely the preparation stage, the e-Warong KPM candidate selection stage, the social assistance distribution (BPNT) stage, the business training stage, the family strengthening stage, the evaluation stage and the graduation stage. Many KPM e-Warong Pondok Ranji feel empowered and empowered by this e-Warong program and many KPM e-Warong Pondok Ranji are now living prosperously.

Keywords: Program Implementation, Family Hope Program, Family Welfare

Pendahuluan

Kemiskinan terus menjadi tantangan yang kontinuitas pada kehidupan, serta kompleksitas masalah ini membuat sulit bagi suatu negara untuk mengatasinya secara mandiri. Kemiskinan umumnya dimaksudkan sebagai keadaan di mana individu ataupun kelompok tidak mampu memakai beragam hak esensi mereka untuk menjaga serta meninggikan taraf hidup yang layak, ataupun ketidakmampuan untuk meraih pendapatan yang mencukupi di tempat kerja guna mencapai kebutuhan hidup. Kemiskinan ialah rendahnya taraf hidup yang disebabkan oleh kurangnya materi suatu kelompok ataupun sekelompok orang disandingkan pada taraf hidup masyarakat sekitarnya (Akib & Tarigan, 2008; BPNT, 2017).

Beragam faktor ekonomi dibidang sebagai pemicu kemiskinan. Pertama, kemiskinan timbul sebab ketidaksetaraan pada kepemilikan sumber daya yang terbatas serta berkualitas rendah. Kedua, kurangnya kualifikasi SDM sebab nasib sial, studi yang rendah, diskriminasi, ataupun keturunan (Cici, 2017). Ketiga, kemiskinan muncul sebab disparitas akses pada modal.

Memberdayakan masyarakat miskin ialah tanggung jawab yang wajib diemban oleh pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Ini menyertakan aktivitas yang ditujukan untuk individu yang kurang berdaya ataupun mempunyai kehidupan yang tidak layak, sehingga mereka mempunyai akses yang setara dengan individu lain pada keperluan dasar layaknya pangan, sandang, kesehatan, perumahan, sandang, keadilan, pendidikan, serta rasa aman (Friedman, 1998). Pemerintah telah berupaya keras dalam menanggulangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah sendiri telah memiliki program-program yang di buat khusus untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sejak periode 2007, Pemerintah Indonesia sudah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah untuk meninggikan efektivitas penanggulangan kemiskinan di sektor perlindungan sosial. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial, program ini ditetapkan mengenai :

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial” Posisi PKH tergolong sebagai bagian dari sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang ada . Program ini beroperasi di bawah naungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah (Kharismawati & Rosdiana Hj. Weni, 2018). Pelaksanaan PKH diselenggarakan oleh Kemensos dengan menyertakan sejumlah kementerian serta lembaga, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Kepala Bappenas, Kemenaker, Kemenag, Kemendikbud, PT POS Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenkes, serta BRI (Nasional, 2009).

Sebagai respons pada persoalan yang ada, pada periode 2016 pemerintah memperkenalkan program terkini lewat Permensos RI No. 25 tahun 2016. Program ini

mengenai Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH).

Program e-Warong termasuk pada kategori bantuan pangan non tunai (BPNT). BPNT ialah bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk warga miskin yang terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kuswardinah, 2007). Tiap bulannya, bantuan ini disalurkan lewat *electronic card* ataupun *electronic account* yang bisa dipakai khususnya untuk pembelian kebutuhan pangan di e-Warong ataupun pedagang bahan pangan yang sudah tercantum serta mencapai syarat.

Program e-Warong mempunyai peran untuk meringankan beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka. Di sisi lain, program ini dimaksudkan untuk menyediakan nutrisi yang lebih seimbang bagi KPM, menumbuhkan akurasi serta ketepatan waktu penyaluran Bantuan Pangan pada KPM, memberikan opsi serta kontrol lebih besar pada KPM untuk pemenuhan kebutuhan pangan, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan kontinuitas, khususnya terwujudnya kesejahteraan sosial. Di sisi lain, diupayakan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas untuk menghindari penyimpangan, serta diupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terlibat pada pelaksanaan program e-Warong bisa melonjak sebab mereka berperan sebagai pelaku program terkait. Pada pelaksanaannya di Indonesia, program e-Warong mempunyai beragam tanggapan, baik yang mencatat keberhasilan implementasi ataupun menghadapi sejumlah tantangan.

Kerangka Teoritis

Program ialah sederetan rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu (Arikunto, 2005). Program juga bisa dibilang sebagai pernyataan yang memuat rangkuman dari harapan ataupun tujuan yang saling terkait serta bergantung satu sama lain, dengan maksud mencapai sebuah target yang serupa. Generalnya, sebuah program menyertakan semua aktivitas yang posisinya di bawah suatu unit administrasi yang tidak beda ataupun target yang saling menggenapi, serta wajib diselenggarakan secara bebarengan ataupun berentet (Muhaimin, 2009).

Efektivitas pelaksanaan suatu program bisa menghasilkan keberhasilan, tingkat keberhasilan yang kurang optimal, ataupun bahkan kegagalan total, tergantung pada hasil ataupun *outcomes* yang dicapai. Kondisi terkait disebabkan oleh adanya beragam faktor pada proses tersebut, yang dapat memberikan dukungan ataupun menjadi hambatan terhadap pencapaian tujuan program (Muhammad, 2018). Mengacu beragam definisi yang sudah disajikan, bisa dinyatakan terkait pelaksanaan program merujuk pada serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh individu atau kelompok, dengan dukungan kebijakan, prosedur, serta sumber daya. Tujuan utama dari pelaksanaan ini ialah untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan serta sasaran yang sudah diputuskan.

Program e-Warong ini termasuk kedalam program pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan masyarakatnya. Idea pemberdayaan dimulai dengan meningkatkan

modal sosial pada masyarakat (Nurwanda, 2022). Saat terdapat kepercayaan, kepatuhan pada aturan, dan jaringan modal sosial yang solid, proses pengarah serta pengelolaan masyarakat akan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, masyarakat juga akan lebih terbuka untuk menerima pengetahuan baru dengan lebih efektif.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Berikut adalah tahapan pemberdayaan Masyarakat, tahapan pemberdayaan tersusun dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya yakni: (Isbandi, 2005):

1. Tahap persiapan, yakni petugas serta penyiapan lapangan. Persiapan petugas mempunyai peran untuk menyatukan pemahaman pada anggota tim fasilitator terkait pendekatan yang akan diterapkan. Sementara persiapan lapangan mempunyai peran untuk melaksanakan penilaian kelayakan pada kawasan yang akan menjadi fokus pemberdayaan.
2. Tahap assesment, mempunyai peran untuk mengenali permasalahan yang dialami serta sumber daya yang dipunyai oleh masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan (Parhusip, 2020).
3. Tahap perencanaan kegiatan, fasilitator berupaya secara partisipatif menarik partisipasi masyarakat untuk merenungkan persoalan yang dialami serta mencari solusinya. Dengan tujuan mengatasi persoalan, diupayakan masyarakat bisa menghasilkan beragam alternatif program serta aktivitas yang bisa dilaksanakan.
4. Tahap formulasi rencana aksi, fasilitator mendukung tiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan untuk merumuskan beragam ide mereka, terkhusus pada bentuk tulisan yang relevan lewat pembuatan proposal. Proposal ini lalu akan diajukan pada pihak penerima dana.
5. Tahap pelaksanaan, masyarakat melaksanakan implementasi dari rencana yang sudah dirumuskan bersama. Pada pelaksanaan program pemberdayaan, peran aktif dari masyarakat serta fasilitator amat penting. Pentingnya membina kerjasama yang baik pada fasilitator serta masyarakat dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa rencana yang sudah disusun dengan optimal bisa mengalami perubahan saat dihadapkan pada situasi lapangan (Rukminto Adi, 2005).
6. Tahap evaluasi, dilaksanakan aktivitas evaluasi sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Evaluasi sepatutnya dilaksanakan dengan menyertakan masyarakat bebarengan dengan fasilitator.
7. Tahap terminasi, merujuk pada fase pengakhiran secara resmi hubungan dengan masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan. Terminasi sepatutnya dilaksanakan ketika masyarakat telah mencapai tingkat mandiri yang memadai, ataupun bahkan bisa terjadi sebab pemberi dana menghentikan bantuannya.

Metode Penelitian

Guna melaksanakan penyelidikan yang lebih detail, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2012). Jenis penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, layaknya persepsi, perilaku, tindakan, serta motivasi, seperti yang dijabarkan oleh Haris (2012). Penelitian kualitatif dijabarkan

sebagai pendekatan yang mempunyai peran untuk mengerti sebuah fenomena pada konteks sosial secara alami, dengan menekankan interaksi komunikasi yang detail pada peneliti serta fenomena yang sedang dicermati (Irwan, 2011).

Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang berusaha untuk menguraikan serta menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan, serta pemikiran individu ataupun kelompok (Moleong, 2012). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan operasionalisasi dan proses pelaksanaan program di Kelurahan Pondok Ranji dengan menggunakan program e-Warong yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program e-Warong di Kelurahan Pondok Ranji

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, lebih menekankan pada proses atau tahapan awal pembentukan e-Warong. Tahap ini menjelaskan bagaimana proses atau tahapan pembentukan e-Warong (Sasmito, 2019). dalam tahap persiapan ini pendamping, beserta KPM PKH, mengadakan pertemuan untuk membahas program e-Warong. Mulai dari persiapan pembuatan proposal pengajuan e-Warong untuk wilayah Pondok Ranji khususnya. Pendamping dan KPM e-Warong mengajukan untuk pembuatan e-Warong Pondok Ranji, pendamping hanya bertugas mendampingi dan sebagai penyambung antara KPM dengan pemerintah yang mengusung program e-Warong ini. Sehingga masyarakat sendiri yang melakukan proses atau tahapan awal pemberdayaan ekonomi melalui program e-Warong. Agar KPM dapat berdayakan dirinya, dan dapat mengetahui proses atau tahapan-tahapan awal pemberdayaan ekonomi melalui program e-Warong.

2. Tahap Assesment

Pemerintah bersama dengan pendamping PKH melakukan proses penyeleksian calon KPM, dengan mengassesment KPM untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi KPM e-Warong, dan untuk meminimalisir kesalahan pemberian bantuan kepada masyarakat. Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, pendamping PKH, yaitu berupa survei mengenai kondisi calon KPM, bagaimana lingkungannya, keadaan rumah, anggota keluarga, dan lain-lain. Yang sudah pasti menjadi KPM e-Warong adalah KPM PKH, dan lebih menyeleksi KPM BPNT. Pemerintah dalam program e-Warong ini tentunya tidak ingin salah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (Sunarti, 2006). Untuk itu pemerintah melakukan proses penyeleksian calon KPM e-Warong yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping kepada calon KPM e-Warong. Dalam hal ini pendamping melakukan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping PKH terbukti adanya observasi/survei yang dilakukan oleh pendamping dan pemerintah terkait

dalam penyeleksian calon KPM e-Warong. Setelah melakukan tahap persiapan, serta tahap seleksi calon KPM e-Warong, dilanjut dengan pembentukan ketua, dan anggota pengurus e-Warong ialah yang bersedia tempat tinggalnya dijadikan lokasi e-Warong.

3. Tahap Perencanaan

Pada Tahap ini pendamping melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai masalah melalui Pelatihan Kewirausahaan yang ada di program e-Warong, mengembangkan potensi masyarakat serta memberikan pelatihan atau pembelajaran mengenai kewirausahaan, membuka peluang usaha, mengembangkan usaha, dan manajemen yang baik untuk membangun suatu usaha, kepada KPM (Lilly, 2022; Utomo et al., 2019). Pelatihan kewirausahaan ini diberikan oleh pendamping secara langsung kepada KPM e-Warong Anugrah Pondok Ranji, pada saat pertemuan yang sudah diagendakan. Beberapa kali pendamping mengundang mantan KPM e-Warong Pondok Ranji yang saat ini kehidupannya sudah sukses dan sejahtera berkat adanya pemberdayaan melalui program e-Warong, untuk hadir dan mengisi kegiatan dalam pelatihan kewirausahaan sebagai contoh untuk KPM lainnya, sehingga KPM lainnya lebih termotivasi lagi hidupnya untuk lebih sejahtera (Yang, 2020).

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap terkait, masyarakat menuangkan gagasan mereka melalui pembinaan penguatan dalam keluarga, selain KPM mendapatkan tahap pelatihan kewirausahaan, KPM juga mendapatkan tahap pembinaan penguatan keluarga. Tahap ini menjadi sebuah serangkaian kategori yang termasuk kedalam tahap pelaksanaan program (Saldana, 2021; Xiang, 2022). Tahap ini menjelaskan bagaimana perencanaan yang ada didalam e-Warong dan pada tahap pembinaan penguatan dalam keluarga, pendamping secara langsung memberikan pembelajaran mengenai bagaimana mengelola atau manajemen sebuah keluarga, mulai dari kondisi hubungan relasi antara anggota keluarga, kondisi ekonomi keluarga, kondisi kesehatan keluarga, dan kondisi spiritual keluarga.

5. Tahap Penyaluran Bantuan Sosial

Setelah melakukan penyeleksian calon KPM e-Warong, masuklah kedalam proses penyaluran bantuan sosial. Pada tahap ini, program e-Warong membantu mempermudah KPM untuk mengakses bantuan sosial dari pemerintah yang ada di dalam program e-Warong. (Andari, 2023) Biasanya penyaluran bantuan di laksanakan pada setiap tiga bulan sekali, atau sesuai agenda yang sudah ada. Ditahap ini, proses penyaluran bantuan dilakukan dua hari, hari pertama melakukan penggesekan saldo KKS KPM atau mengambil di Kelurahan melalui PT POS, dari penerimaan bantuan tersebut, nanti setiap KPM akan menerima bukti struk penggesekan KKS/bukti pengambilan (Saharuddin, 2021). Lalu pada hari ke dua, masuk pada penyaluran bantuan sosial, KPM yang mau mengambil bantuan sosialnya harus datang ke e-Warong Pondok Ranji, dan membawa struk

penggesekan saldo KKS. Penyaluran bantuan sosial di lakukan di lokasi e-Warong, dengan tujuannya mempermudah KPM e-Warong untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan dapat mensejahterakan kehidupan KPM e-Warong (Nouzari, 2019).

6. Tahap Evaluasi

Bedasarkan hasil temuan, pada hal ini pendamping, pengurus e-Warong, dan KPM e-Warong melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan atau proses pelaksanaan melalui program e-Warong (Kohl, 2023). Semua tahap atau kegiatan yang ada di program e-Warong ini di evaluasi, untuk mencari atau mengetahui permasalahan atau kendala yang dialami setiap kali kegiatan-kegiatan yang lainnya terlaksana (Afriyanti, 2023). Untuk evaluasi keberhasilan sebuah kegiatan, dikatakan berhasil dilakukan apabila di setiap kegiatan pelaksanaan program melalui program e-Warong, hanya sedikit atau tidak adanya kendala atau masalah pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi atau pemutusan hubungan yang dilakukan pemerintah dalam program e-Warong, yang bertujuan untuk memutus sebuah hubungan kerjasama antara KPM dengan Program e-Warong (Kim, 2023). Program e-Warong ini mempunyai bantuan sosial berjangka pendek, sesuai dengan tingkatan pencapaian KPM selama menjadi mitra e-Warong. Apabila KPM tersebut sudah merasa cukup berdaya dan merasa meningkat kesejahteraan hidupnya, pendamping wajib melakukan pengecekan pencapaian KPM, mencopot status KPM e-Warong kepada KPM yang sudah meningkat kesejahteranya.

Dalam setiap pemutusan hubungan yang dilakukan oleh program e-Warong terjadi apabila, terdapatnya KPM yang sudah meningkat kesejahteraan sosial di kehidupan keluarganya, dan pada KPM yang melakukan pelanggaran hukum seperti pemalsuan data-data KPM (Cleveland, 2021).

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian terkait pelaksanaan program e-Warong untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat ini di Kelurahan Pondok Ranji. Pertama, kegiatan-kegiatan yang ada didalam program e-Warong ini meliputi, tahap persiapan, tahap seleksi calon KPM, tahap penyaluran bantuan sosial, tahap pelatihan kewirausahaan, tahap pembinaan penguatan dalam keluarga, tahap evaluasi, serta tahap terminasi. Namun dari hasil temuan lapangan, kegiatan yang berjalan hampir bisa dikatakan berjalan dengan baik dan efektif, hanya saja tahap pembinaan penguatan dalam keluarga masih kurang efektif.

Kedua, proses pelaksanaan program yang dilakukan e-Warong, secara teori model Implementasi program yang memiliki tiga (3) elemen kesesuaian dikemukakan Korten, yakni program itu sendiri, pelaksana program serta sasaran program, dimana ketiga elemen itu saling berkaitan sehingga sesuai dengan tujuan program. Program akan sukses

diselenggarakan apabila ada keserasian dari 3 unsur implementasi program. Pertama keserasian program dengan pemanfaat, pada kondisi terkait program e-Warong ini menjadi kebutuhan dari penerima manfaat itu sendiri, tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Pondok Ranji, membuat program ini menjadi solusi untuk masyarakat dikarenakan bertujuan untuk membantu ekonomi dan berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Kedua, kesesuaian program dengan pelaksana program, dalam hal ini, Pemerintah membentuk program PKH dengan tujuan menanggulangi kemiskinan, kemudian pemerintah bertugas memberikan wewenang kepada masing-masing daerah yaitu Kelurahan, seperti Koordinator PKH Tangerang Selatan membagi tugas kepada Pekerja sosial di Kelurahan Pondok Ranji sebagai pendamping untuk mengawasi dan membentuk program e-Warong di Kelurahan tersebut. Ketiga, kesesuaian antara penerima manfaat dan pelaksana program, yaitu kesesuaian syarat yang ditentukan Kelurahan untuk mendapatkan output program dengan sasaran program, dengan kata lain sesuai dengan output yang diharapkan Kelurahan Pondok Ranji.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, untuk e-Warong ini lebih progresif kedepannya, peneliti akan menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Untuk pendamping, seharusnya lebih sering untuk memonitoring terhadap perkembangan e-Warong kepada pengurus e-Warong Pondok Ranji.
2. Sebaiknya pemerintah dan pendamping pada tahap penyeleksian calon KPM e-Warong, lebih perlu dikaji dalam lagi mengenai kondisi calon KPM.
3. Pada saat penyaluran bantuan sosial, seharusnya lebih siap lagi secara teknis sehingga pada saat pemberian bantuan sosial KPM tidak terjadi salah paham antara KPM dengan pendamping dan pengurus e-Warong Pondok Ranji.
4. Pada tahap pelatihan kewirausahaan dan pembinaan penguatan dalam keluarga, dilakukan lebih sering, contohnya dua atau tiga kali dalam satu bulan sehingga menghasilkan perkembangan yang signifikan terhadap KPM.

Daftar Pustaka

- Afriyanti, A. (2023). Improving the Capability of Corn Processing into Tortillas by Family Welfare Programme, in Gedong, Ngadirojo, Wonogiri Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 374. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337400003>
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukuran. *Universitas Negeri Makassar: Jurnal Kebijakan Publik*.
- Andari, S. (2023). Empowerment and mobility of women from domestic to public spaces in improving family welfare. *Multidisciplinary Science Journal*, 5. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2023031>
- Arikunto, S. (2005). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.

- BPNT, T. P. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. T.p.
- Cici, A. d. (2017). Pemanfaatan Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Penerima di Kampung Lubuk Sarik, Pesisir Selatan. *Pendidikan Sosiologi*.
- Cleveland, K. C. (2021). Justice for Families: International Perspectives on Improving Parent Understanding in Child Welfare Court Cases. *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation*, 10(2), 116–121. <https://doi.org/10.1027/2157-3891/a000010>
- Friedman, M. (1998). *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. EGC.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sakemba Humanika.
- Irwan, S. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kharismawati, I. S., & Rosdiana Hj. Weni, S. Sos. M. A. P. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPTN) Melalui E-Warong di Kelurahan Sidoresmo Kecamatan Wonocolokota Surabaya. *Unesa: Jurnal Unesa*.
- Kim, J. (2023). A Multiple-Path Model of Workforce Development for Improving the Fidelity of Family Team Conference in the Child Welfare System. *Journal of Public Child Welfare*, 17(5), 1110–1130. <https://doi.org/10.1080/15548732.2022.2137273>
- Kohl, P. L. (2023). Improving child behavior through parent training in child welfare services: A mixed-methods study of families receiving in-home services. *Children and Youth Services Review*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107269>
- Kuswardinah, A. (2007). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. FT UNNES.
- Lilly, A. (2022). Improving Outcomes for Families of Children With Medical Needs Known to Child Welfare: A Nurse Care Coordination Program. *Child Maltreatment*, 27(2), 267–278. <https://doi.org/10.1177/10775595211044496>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, S. d. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Kencana.
- Muhammad, Y. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. *Malang: Jurnal Administrasi Publik*.
- Nasional, B. K. (2009). *Hubungan Program Keluarga Berencana Nasional dengan Kesejahteraan Keluarga*. BKKBN.
- Nouzari, R. (2019). Post-traumatic growth among family caregivers of cancer patients and its association with social support and hope. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 7(4), 319–328. <https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.73959.0>
- Nurwanda, A. (2022). Analisis Program Inovasi Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Ciamis. *Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Parhusip, A. (2020). Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui E-Warong di Kecamatan Sunggal Medan. *Medan: Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*.
- Rukminto Adi, I. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS.

-
- Saharuddin. (2021). Improving the welfare of the poor with quality assistants and quality of the family hope program (PKH) in community empowerment in Makassar city. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3681–3688.
- Saldana, L. (2021). Meeting the Needs of Families Involved in the Child Welfare System for Parental Substance Abuse: Outcomes From an Effectiveness Trial of the Families Actively Improving Relationships Program. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689483>
- Sasmito, C. E. R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Malang: Journal of Public Sector Innovation*.
- Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah, Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*. Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. *Kediri: Jurnal Administrasi Publik*.
- Xiang, G. (2022). Links between family cohesion and subjective well-being in adolescents and early adults: The mediating role of self-concept clarity and hope. *Current Psychology*, 41(1), 76–85. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00795-0>
- Yang, Y. (2020). Hope and Creative Self-Efficacy as Sequential Mediators in the Relationship Between Family Socioeconomic Status and Creativity. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00438>